



**KEBIJAKAN POLITIK DALAM NEGERI PEMERINTAHAN PRESIDEN  
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO TAHUN 2004-2009**

**SKRIPSI**

**Oleh**  
Alex Prasetyo  
NIM 120210302028

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
2019**



**KEBIJAKAN POLITIK DALAM NEGERI PEMERINTAHAN PRESIDEN  
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO TAHUN 2004-2009**

**SKRIPSI**

diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata  
Satu (S1) Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu  
Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Jember

**Oleh**

Alex Prasetyo  
NIM 120210302028

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
2019**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibu Amik Sugiarti dan Bapak Kadir Basuki, serta Ibu Angkat Sartini dan Bapak Angkat Budi Eko Adi, S. H., yang telah memberikan kasih sayang tulus dan doa di setiap langkahku, memberikan bimbingan, perlindungan dan semangat dalam menjalani hidup demi keberhasilanku.
2. Istriku Litha Verlisya PB, S. Pd. Dan Anakku Muhammad Abinaya Rajendra, terima kasih untuk waktu dan motivasinya.
3. Guru-guruku mulai SD sampai perguruan tinggi, terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan kepadaku.
4. Almamater tercinta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember yang kubanggakan.

**MOTTO**

“Politik tidak didasarkan pada untung rugi. Harus mengutamakan  
kepentingan rakyat & masa depan Bangsa”  
(Susilo Bambang Yudhoyono)\*



\*) <https://www.goodreads.com/quotes/896463-politik-tidak-didasarkan-pada-untung-rugi-harus-mengutamakan-kepentingan-rakyat>

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alex Prasetyo

NIM : 120210302028

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: “Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Maret 2019

Yang menyatakan,

Alex Prasetyo.

NIM. 120210302028

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN POLITIK DALAM NEGERI PEMERINTAHAN PRESIDEN  
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO TAHUN 2004-2009**

Oleh:

Alex Prasetyo  
NIM. 120210302028

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Drs. Kayan Swastika, M. Si.

Dosen Pembimbing II : Drs. Marjono, M. Hum.

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009” ini telah diuji dan disahkan oleh Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember pada :

hari, tanggal : Jumat, 15 Maret 2019

tempat : Gedung 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Kayan Swastika, M. Si.  
NIP. 19670210 200212 1 002

Drs. Marjono, M. Hum.  
NIP. 19600422 198802 1 001

Anggota I,

Anggota II

Drs. Sumarjono, M. Si.  
NIP. 19580823 198702 1 001

Dr. Sumardi, M. Hum.  
NIP. 19600518 198902 1 001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D  
NIP. 196808021993031004

## RINGKASAN

**Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009**, Alex Prasetyo, 120210302028; 2018, xi + 67; Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Susilo Bambang Yudhoyono atau yang terkenal dengan sebutan SBY, telah membuat babak baru dalam perjalanan sejarah Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono dilantik sebagai presiden keenam Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004 bersama wapresnya Jusuf Kalla yang kemudian terpilih kembali di Pemilu 2009 bersama wapresnya Boediono. Bersama dengan pasangannya, Susilo Bambang Yudhoyono memiliki komitmen untuk tetap melaksanakan agenda reformasi. Program pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dikenal dengan program 100 hari. Program ini bertujuan memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja pemerintah dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; (1) bagaimanakah Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009; (2) bagaimanakah dampak Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan dalam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009?. Tujuan dari penelitian ini adalah; (1) untuk menganalisis Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009; (2) untuk menganalisis dampak Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009.

Manfaat dari penelitian ini adalah; (1) bagi peneliti, sebagai latihan dalam penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah, latihan berfikir dan memecahkan masalah secara kritis dan logis, serta memperdalam pengetahuan tentang kebijakan politik dalam negeri pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009; (2) bagi mahasiswa pendidikan sejarah, dapat menambah pengetahuan tentang kebijakan politik dalam negeri pemerintahan



presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009; (3) bagi almamater, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah nasional indonesia modern. Subyek dalam penelitian ini adalah kebijakan politik dalam negeri pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009.

Hasil penelitian ini adalah ada beberapa kebijakan utama yang dikeluarkan oleh pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam negeri, yaitu meliputi kebijakan politik, kebijakan ekonomi, kebijakan keamanan dan ketahanan, serta kebijakan sosial budaya.

Kesimpulan dari penelitian ini meliputi dalam hal politik adalah sistem multipartai yang dianut oleh pemerintahan Indonesia, serta pembentukan kabinte indonesia bersatu untuk membantu dan melaksanakan program kerja pemerintah, serta menganut paham konsep Trias Politika, yaitu pemisahan 3 badan utama dalam pemerintahan (Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif) yang kesemuanya memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Sedangkan dalam hal kebijakan ketahanan dan keamanan dengan meredam gerakan separatis di Aceh, Ambon dan Maluku, serta menekan angka KKN di dalam negeri. Sedangkan dalam hal ekonomi, berhasil menekan angka inflasi di awal pemerintahan dan mengeluarkan kebijakan BLT untuk rakyat miskin untuk menutupi kenaikan harga BBM.

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah swt. Atas segala rahmat, dan karunia-nya sehingga penulisan tugas akhir skripsi yang berjudul “Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009”.

Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc. Ph.D, selaku Rektor Universitas Jember
2. Prof. Dr. Dafik, M.Sc. Ph. D, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas jember;
3. Dr. Sumardi, M. Hum, selaku ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Jember, sekaligus sebagai penguji anggota yang telah banyak memberikan masukan dalam skripsi ini;
4. Dr. Nurul Umamah, M.Pd, selaku ketua Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember;
5. Drs. Kayan Swastika, M. Si, selaku Sekretaris Jurusan PIPS FKIP Universitas Jember, sekaligus sebagai dosen pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan dan saran dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini;
6. Drs. Marjono, M. Hum., selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan dan saran dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini;
7. Drs. Sumarjono, M. Si., selaku dosen penguji anggota yang telah banyak memberikan masukan dalam skripsi ini;
8. Dosen-dosen pendidikan sejarah yang telah membimbing penulis dari awal sampai saat ini;
9. Orang tua tercinta, Ibu Amik Sugiarti dan Bapak Kadir Basuki. Serta Ibu Angkat Sartini dan Bapak Angkat Budi Eko Adi, S. H., yang tiada henti-

hentinya memberikan do'a, semangat, motivasi, dan nasehat yang selalu mengiringi setiap langkah penulis;

10. Sahabat-sahabat terbaikku Agus Al-Fauzi, Sungkar Pratama, Rahardi Brilliantama, dan Saputra Jaya Nugraha, yang telah meluangkan waktunya untuk menemani dan memberikan bantuan selama proses pengerjaan skripsi ini;
11. Teman-teman Program Studi Pendidikan Sejarah angkatan 2012; dan,
12. Semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 15 Maret 2019

Penulis

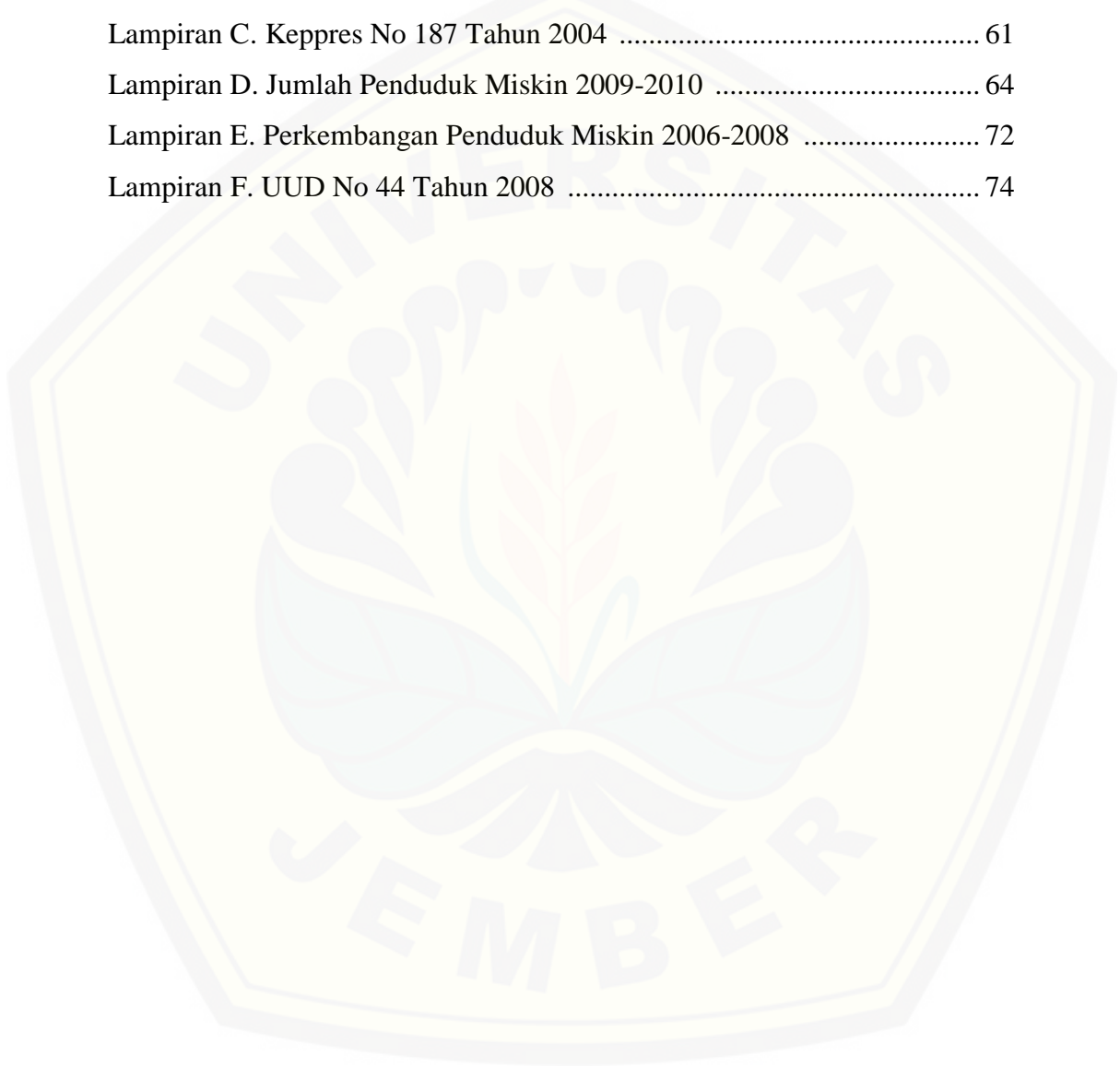
**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Penegasan Judul .....	4
1.3 Ruang Lingkup Penelitian .....	5
1.4 Rumusan Masalah .....	5
1.5 Tujuan Penelitian .....	6
1.6 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>15</b>
3.1 Heuristik .....	15
3.2 Kritik .....	17
3.3 Interpretasi .....	18
3.4 Historiografi .....	19
<b>BAB 4. KEBIJAKAN DALAM NEGERI PEMERINTAHAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO TAHUN 2004-2009 .....</b>	<b>20</b>
4.1 Kebijakan Politik .....	20
4.1.1 Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu .....	20
4.1.2 Konsep Trias Politika .....	22

4.1.3 Sistem Multi-Partai .....	23
4.2 Ketahanan dan Keamanan .....	28
4.3 Kebijakan Ekonomi .....	34
4.3.1 Tingkat Inflasi 2004-2009 .....	37
4.3.2 Jumlah Penduduk Miskin .....	38
4.4 Kebijakan Sosial-Budaya .....	40
<b>BAB 5. DAMPAK KEBIJAKAN DALAM NEGERI PEMERINTAHAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO TAHUN 2004-2009 .....</b>	<b>43</b>
5.1 Dampak Politik .....	43
5.2 Dampak Ekonomi .....	45
5.3 Dampak Pendidikan.....	48
<b>BAB 6. PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
6.1 Simpulan .....	53
6.2 Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>57</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran A. Matriks Penelitian .....	57
Lampiran B. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu .....	58
Lampiran C. Keppres No 187 Tahun 2004 .....	61
Lampiran D. Jumlah Penduduk Miskin 2009-2010 .....	64
Lampiran E. Perkembangan Penduduk Miskin 2006-2008 .....	72
Lampiran F. UUD No 44 Tahun 2008 .....	74



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono atau yang terkenal dengan sebutan SBY, telah membuat babak baru dalam perjalanan sejarah Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono dilantik sebagai presiden keenam Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004 bersama wapresnya Jusuf Kalla yang kemudian terpilih kembali di Pemilu 2009 bersama wapresnya Boediono. Bersama dengan pasangannya, Susilo Bambang Yudhoyono memiliki komitmen untuk tetap melaksanakan agenda reformasi. Program pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dikenal dengan program 100 hari. Program ini bertujuan memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja pemerintah dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung (Nugroho, 2010:32).

Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden keenam Republik Indonesia secara demokratis dengan cara dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia menandakan posisi negara Indonesia pada waktu itu sebagai negara yang menjung tinggi nilai-nilai demokrasi setelah tuntutan reformasi digaungkan sejak 1998. Di sisi lain dengan terpilihnya Susilo Bambang Ydhoyono sebagai presiden menentukan arah politik partai Demokrat dan partai-partai lainnya untuk memulihkan kondisi negara dari segala kekurangannya, baik dalam hal, politik, sosial budaya, pendidikan, dan kemanan dan ketahanan.

Pada periode kepemimpinan pertamanya, Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu pada tanggal 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, presiden melakukan perombakan yang kedua pada 7 Mei 2007. Perombakan ini tidak lepas dari evaluasi kinerja kabinet yang selama ini masih dinilai kurang bekerja dengan maksimal sehingga reformasi birokrasi diperlukan. Perombakan kabinte ini juga

menunjukkan kepada publik bahwa Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam hal perpolitikan menggunakan konsep Multipartai.

Sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan, partai-partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat pancasila secara universal. Masyarakat Indonesia pun dapat memilih calon wakil rakyat pilihan rakyat secara langsung. Sistem multipartai ini juga menandakan adanya koalisi dalam parlemen pemerintahan Indonesia, baik di legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Koalisi partai-partai tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas politik agar tidak terjadi hegemoni kekuasaan oleh salah satu partai tertentu, serta sebagai langkah untuk mengamankan posisi dan kebijakan yang dikehendaki setiap partai atau kolaisi tersebut demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dalam hal politik inipun presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerapkan politik pencitraan di depan publik.

Politik pencitraan merupakan salah satu senjata ampuh yang digunakan para pemimpin Negara untuk mengambil hati rakyatnya. Pola politik pencitraan tentu digunakan oleh hampir seluruh pemimpin Negara di dunia, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam konteks internal, politik pencitraan Susilo Bambang Yudhoyono dilakukan dengan kapabilitas internalnya, yakni dengan kapabilitas retorika atau kemampuan bicara di depan umum. Dalam konteks eksternal, politik pencitraan Susilo Bambang Yudhoyono dilakukan dengan berbagai aspek, salah satunya dengan kampanye, dan introduksi prestasi positif Susilo Bambang Yudhoyono selama memerintah Indonesia. Hal tersebut tentu dapat memicu ketertarikan rakyat Indonesia akan keberhasilan Susilo Bambang Yudhoyono dan menjadi simpatik atasnya. Salah satunya dalam hal pemberantasan Korupsi yang menjadi cikal bakal naiknya popularitas Susilo Bambang Yudhoyono di bidang Politik (Lesmana, 2009:45).

Pemberantasan terorisme yang sampai saat ini berlangsung bisa jadi merupakan salah satu kelebihan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang seolah tidak kenal kompromi terhadap para pelaku terorisme, hal ini juga didukung oleh latar belakang Susilo Bambang Yudhoyono dari jajaran militer.



Pembentukan pasukan khusus anti terorisme atau Detasemen khusus 88 Anti Terorisme (Densus 88), yang didasarkan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, merupakan salah satu strategi yang cukup dapat diandalkan dalam rangka mengeliminasi atau bahkan menghapuskan terorisme di bumi Indonesia. Termasuk masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Komitmen terhadap pemberantasan korupsi seharusnya tidak terbatas pada kata-kata saja, akan tetapi harus diwujudkan dalam tindakan dan perilaku yang benar. Dorongan politik dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sangat diperlukan untuk mendukung tindakan dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam memberantas korupsi, apalagi dengan adanya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini masih dianggap kurang berjalan dengan baik karena banyaknya intrik dan lobi-lobi politik yang menyebabkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono seperti berjalan di tempat untuk masalah penegakan Hukum dibidang KKN ini (Hisyam, 2004:53). Lobi-lobi dan intrik politik inilah yang juga berdampak pada perkembangan Perekonomian Indonesia pada masa Susilo Bambang Yudhoyono.

Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada tahun 2011. Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula. Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara. Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa pengaruh yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia.

Di bidang ekonomi inilah yang menyokong penambahan jumlah anggaran dalam bidang pendidikan (Lesmana, 2009:63).

Pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi salah satu masa pemerintahan di Indonesia yang dimulai dari hasil pemilihan umum rakyat Indonesia secara demokratis, sehingga awal-awal perjalanan pemerintahan presiden Susilo menjadi sorotan berbagai pihak karena menjadi awal pemerintahan demokratis Indonesia. Pemerintahan Susilo tidak luput dengan berbagai intrik politik dan berbagai macam masalah, salah satunya adalah komitmen pemerintahan yang harus berperang melawan Korupsi dan tidak memberikan Kompromi apapun, serta penyelesaian berbagai masalah social lainnya berupa kasus HAM dan bentrokan Horizontal antar masyarakat, sedangkan di sisi lain pemerintah juga berjuang keluar dari masa-masa naiknya inflasi dan melemahnya perekonomian bangsa Indonesia, sehingga pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dituntut untuk menyelesaikan berbagai macam masalah selama masa-masa pemerintahannya tahun 2004-2009

Ketertarikan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan melihat kebijakan politik dalam negeri pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari awal sampai menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-enam. Serta lebih difokuskan kepada kebijakan-Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan Indonesia pada masa itu baik dalam bidang Ekonomi, sosial dan politik. Berawal dari latar belakang di atas serta ketertarikan penulis meneliti lebih jauh tentang tata cara Kebijakan Politik pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terjadi terutama kebijakan dalam negeri, maka penulis menyadari permasalahan tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam serta dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Karena itu, penulis merumuskan penelitian ini dengan judul “**Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004-2009**”.

## 1.2 Penegasan Judul

Penegasan judul ini dibuat untuk memperjelas dan supaya tidak terjadi kesalahpahaman serta mendapatkan gambaran yang jelas mengenai judul “Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004-2009”, maka penulis perlu memberikan penegasan dari istilah yang terdapat dalam judul yang dibuat yaitu Kebijakan, Politik, Pemerintahan, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Noer (2007) dalam buku Pengantar ke Pemikiran Politik menjelaskan definis Politik adalah Ilmu Politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-mata, dan tidak pula pada negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatif baru. Di luar bidang hukum serta sebelum negara ada, masalah kekuasaan itu pun telah pula ada. Hanya dalam zaman modern ini memanglah kekuasaan itu berhubungan erat dengan negara.

Kebijakan Politik adalah petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelenggara negara dan pemerintahan (Budiardjo, 2003:8).

C. F Strong dalam bukunya yang berjudul “Ekologi Pemerintahan” menjelaskan tentang pengertian pemerintahan sebagai berikut: “Maksudnya Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara perdamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, (1) harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. (2) harus mempunyai kekuatan Legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-undang. (3) harus mempunyai kekuatan finansial/kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka kepentingan Negara”. (Strong, 1998: 4-5)

Berdasarkan pengertian diatas, maka maksud yang terkandung dalam judul “**Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Presiden Susilo**

**Bambang Yudhoyono Tahun 2004-2009”** adalah segala bentuk pelaksanaan perencanaan program kerja Kabinet Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di Bidang Politik untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di dalam negeri Indonesia pada tahun 2004-2009.

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Penentuan ruang lingkup penelitian amat penting dengan maksud untuk mengarahkan penelitian sehingga tidak keluar dari pokok bahasan yang sudah ada. Selain itu juga untuk mengerucutkan permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi waktu (temporal), tempat (spasial), dan materi.

Ruang lingkup waktu (temporal) penelitian ini dimulai dari tahun 2004 sampai tahun 2009. Dimulai dari tahun 2004 saat Susilo Bambang Yudhoyono memenangi Pemilihan Umum secara demokrasi di Indonesia untuk pemilihan Presiden. Tahun 2009 adalah batasan peneliti diakhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, walaupun untuk periode selanjutnya Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih menjadi Presiden Indonesia untuk kedua kalinya. Pada tahun 2009 itu masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono sudah selesai. Perlu diperhatikan bahwa penetapan ruang lingkup (temporal) ini tidaklah bersifat mutlak tetapi fleksibel, karena tidak menutup kemungkinan peneliti juga akan membahas beberapa kejadian yang berhubungan dengan kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebelum tahun 2004.

Ruang lingkup tempat (spasial) penelitian ini, lebih memfokuskan peristiwa yang terjadi di Indonesia khususnya Jakarta mengingat pusat pemerintahan Indonesia dan peristiwa-peristiwa yang menyangkut negara (politik) kebanyakan terjadinya di sana. Sedangkan ruang lingkup materi yaitu Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhyono tahun 2004-2009.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan ruang lingkup permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah :

- 1) bagaimanakah Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009 ?
- 2) bagaimanakah dampak Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

- 1) untuk menganalisis Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009;
- 2) untuk menganalisis dampak Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini penulis dapat memberikan manfaat bagi :

- 1) bagi peneliti, sebagai latihan dalam penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah, latihan berfikir dan memecahkan masalah secara kritis dan logis, serta memperdalam pengetahuan tentang kebijakan dalam negeri pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009;
- 2) bagi mahasiswa pendidikan sejarah, dapat menambah pengetahuan tentang kebijakan dalam negeri pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009;
- 3) bagi almamater, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian;
- 4) bagi peneliti lain, sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian yang sejenis dan sekaligus pengembangannya.

## BAB 2. TINJAUAN PUUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini mengemukakan kajian terdahulu yang berkaitan dengan Kebijakan Politik dalam Negeri Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004-2009. Kajian teori dilakukan dengan mengumpulkan pendapat atau teori-teori yang dikemukakan oleh para peneliti sebelumnya. Tinjauan pustaka merupakan sebuah pembahasan yang lebih menekankan pada upaya memposisikan penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan hasil-hasil terdahulu mencapai tema yang sama. Tinjauan pustaka juga mengemukakan pendekatan dan teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Berbagai kajian tentang teori-teori, pendekatan-pendekatan dan penelitian terdahulu diperoleh dari sumber-sumber berupa buku, jurnal dan skripsi.

Nugroho (2010) buku yang berjudul "*Tetralogi Sisi Lain Susilo Bambang Yudhoyono; Pak Beye dan Keluarganya, Pak Beye dan Istanyanya, Pak Beye dan Kerabatnya, Pak Beye dan Politiknya*". Buku ini merupakan kumpulan buku yang terdiri dari empat pembahasan utama dan dipilah-pilah, sebagaimana judul buku tersebut yaitu masalah Keluarga, kerabat, istana, dan Politik. Dari keempat buku ini pembahasannya sesuai dengan judul masing-masing. Yaitu dalam hal keluarga di dalam buku tersebut lebih banyak membahas mengenai kehidupan pribadi bapak Susilo Bambang Yudhoyono dengan keluarga besarnya yang ada di Cikeas, sedangkan buku selanjutnya adalah membahas mengenai Kerabat keluarga besar bapak Susilo Bambang Yudhoyono, buku tersebut memfokuskan pada pembahasan kehidupan pribadi dan hubungan kekerabatan Susilo Bambang Yudhoyono dengan keluarga, baik dengan kolega maupun dengan teman karib. Sedangkan dua buku lainnya yaitu masalah Istana dan Politik bagi penulis dijadikan sebagai sumber utama bahan rujukan untuk penambahan sumber penelitian yang sedang dilakukan penulis dalam hal Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dua buku tersebut memfokuskan pembahasannya mengenai perjalanan politik Susilo Bambang Yudhoyono dari sebelum dan sesudah menjadi presiden republik Indonesia.

Makruf (2016) buku yang berjudul “*Ensiklopedi Presiden Republik Indonesia; Susilo Bambang Yudhoyono*”, buku ini merupakan kumpulan dari buku-buku profil pribadi Presiden yang memimpin Indonesia, salah satunya adalah buku keenam ini yang membahas masalah profil dari Susilo Bambang Yudhoyono, profil yang dibahas adalah perjalanan kehidupan dari bapak Susilo Bambang Yudhoyono dari kecil sampai ke perjalanan karir di kemiliteran yang dari awal dijalani sebelum memasuki dunia politik. Selanjutnya fokus pembahasan yang ditulis dalam buku ini adalah masalah perjalanan kepemimpinan yang dijalani oleh bapak Susilo Bambang Yudhoyono, baik kebijakan-kebijakan politik, kebijakan dalam negeri dan luar negeri, serta hubungan internasional yang dilaksanakan selama masa kepemimpinannya. Perbedaannya buku ini dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis adalah pemfokusan pada kebijakan politik saja, baik itu dalam negeri maupun luar negeri yang dijalankan oleh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Buku ini memberikan gambaran mengenai profil dan kehidupan presiden-presiden Indonesia dari masa Soekarno sampai dengan masa Joko Widodo, tetapi tidak terlalu memfokuskan kajiannya kepada satu presiden saja sehingga terlalu melebar. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan pada satu presiden saja dengan kajian kebijakan dalam negeri.

Lesmana (2009) buku yang berjudul “*Dari Soekarno sampai Susilo Bambang Yudhoyono; Intrik & Lobi Politik Para Penguasa*”. Buku ini membahas mengenai lobi-lobi yang dilakukan oleh elite politik dan penguasa di Indonesia di setiap permasalahan yang sedang dihadapi bangsa ini, baik dalam negeri secara internal, maupun masalah dari luar secara eksternal. Lobi-lobi yang dilakukan oleh penguasa tersebut terus mewarnai perjalanan kehidupan pemerintahan yang berkuasa di Indonesia, karena memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa posisi negara Indonesia selalu menjadi rebutan dari negara lain, atau bahasa lainnya selalu menjadi lahan basah dari kepentingan negara lain untuk mengambil alih Sumber Daya Alam yang ada di Indonesia. Selain hal tersebut juga ada intrik-intrik politik dalam negeri yang terus mewarnai kehidupan perjalanan bangsa Indonesia. Intrik-intrik itulah yang menjadi ciri khas dan gambaran umum

mengenai politik indonesia secara keseluruhan. Buku ini secara garis besar juga membahas mengenai pemerintahan masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang di dalam masa pemerintahan tersebut selalu ada intrik dan lobi-lobi politik antara penguasa pemerintahan, pemilik modal dan elite politik. Buku ini lebih memfokuskan pada lobi-lobi dan intrik politik yang terjadi selama masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2014, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis hanya memfokuskan pada aspek kebijakan politik saja. Kepentingan penulis dalam buku ini adalah mendapatkan sumber data terkait perjalanan politik dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, terutama ketika menjabat sebagai Presiden republik Indonesia.

Hisyam (2004) yang berjudul "*Susilo Bambang Yudhoyono, Sang Demokrat*", buku ini adalah buku biografi yang ditulis dalam 14 bab. Dengan prolog dan epilog dan disertai dengan foto-foto peristiwa yang berkaitan dengan kegiatannya. Buku ini menyajikan cukup lengkap mengenai kisah latar belakang keluarga Susilo Bambang Yudhoyono, masa kecil dan remaja, masa pendidikan dan karier dalam kemiliteran dari medan tempur hingga menjadi pimpinan TNI, pengalaman sebagai menteri, sejumlah ide dan gagasannya tentang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta pengalaman dalam dunia internasional dalam suasana kehidupan keluarga yang harmonis. Secara garis besar buku ini menyajikan profil bapak Susilo Bambang Yudhoyono secara lengkap dan lugas, tetapi di sisi lain ada celah yang masih belum dibahas secara mendalam adalah aspek Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan dari bapak Susilo Bambang Yudhoyono selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, buku ini menggambarkan profil Susilo Bambang Yudhoyono sebagai seorang ketua umum partai Demokrat, bukan sebagai seorang Presiden, sedangkan fokus kajian dalam penelitian yang sedang dilakukan peneliti, lebih memfokuskan Susilo Bambang Yudhoyoni sebagai seorang Presiden yang memegang penuh kendali pemerintahan yaitu terkait Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama menjabat sebagai Presiden Indonesia tahun 2004 sampai 2009.



Karya Pribadi dari Susilo Bambang Yudhoyono diantaranya adalah “*Susilo Bambang Yudhoyono, Selalu ada Pilihan*” (2014). Buku ini merupakan karya pribadi dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, buku ini lebih banyak membahas mengenai perjalanan kehidupan pribadi Susilo Bambang Yudhoyono sejak menjabat sebagai Presiden Indonesia tahun 2004-2009, perjalanan hidup tersebut meliputi kehidupan pribadi di Istana, Partai Politik, Kolega, anak Buah, serta masyarakat Indonesia yang sering ditemui bapak Susilo Bambang Yudhoyono selama menjabat sebagai Presiden. Buku ini banyak memfokuskan pada hal-hal yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono ketika menjalani kehidupannya sebagai Presiden, sehingga terduga terkesan buku ini lebih banyak mencerminkan sikap elitisme dari sosok Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga subjektivitas yang sangat tinggi. Tetapi bagi penulis ini merupakan salah satu sumber primer yang sangat diperlukan penulis untuk menyelesaikan penelitian yang sedang dilakukan peneliti terkait kebijakan-kebijakan yang pernah dikeluarkan dan dilajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2004 sampai 2009. Kebijakan-kebijakan pemerintahan itulah yang akan dilihat sejauh mana terlaksana, yang tidak terlaksana, kendala yang dihadapi serta dampak-dampak yang akan ditimbulkan ketika pelaksanaan dan realisasi dari kebijakan tersebut.

Skripsi Nurhandayani, D. (2013) yang berjudul “*Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Dalam Penyelesaian Kekerasan Etnis Muslim Rohingya di Myanmar*”. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai beberapa langkah dari Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kasus kekerasan yang menimpa etnis Muslim Rohingya yang ada di Myanmar. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2007 Indonesia merupakan Ketua dari ASEAN, sehingga merasa perlu untuk ikut campur dan menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi di Myanmar, yaitu kasus kekerasan etnis muslim Rohingya yang dilakukan oleh Etnis Budha dan Militer Myanmar. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu adalah melalui jalur diplomasi dan menjadi tempat mediasi untuk kedua belah pihak yang sedang bersengketa, walaupun

kenyataannya kasus kekerasan yang menimpa etnis muslim Rohingya tetap berlanjut sampai sekarang. Terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis dengan skripsi ini adalah untuk menjadi sumber tambahan terkait Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama menjabat sebagai presiden republik Indonesia tahun 2004-2009, yang salah satunya adalah kebijakan luar negeri bebas aktif yang tetap dipegang teguh oleh bangsa Indonesia untuk menunjukkan kepedulian terhadap keadaan dunia internasional yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap Indonesia.

Skripsi Sari, N. (2016) yang berjudul *“Reformasi Birokrasi di Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2009-2014*. Dalam skripsi ini hanya memfokuskan pada sistem birokrasi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, birokrasi yang dimaksudkan disini adalah kabinet kerja yang dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjalankan roda pemerintahan Indonesia tahun 2004-2009, tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam skripsi ini lebih menekankan pada aspek intrik politik dan pembagian kekuasaan dan jatah di kabinet kementerian yang dibentuk oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu juga birokrasi yang dibentuk oleh Susilo Bambang Yudhoyono ini mengalami perombakan, sebagaimana judul skripsi yang disebutkan di atas adalah mengenai Reformasi atau perubahan struktur sistem kerja kabinet. Perombakan kabinet tersebut merupakan langkah yang diambil oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memulihkan dan menstabilkan keadaan Indonesia. serta untuk meninjau kinerja bawahannya agar jauh lebih baik dalam menjalankan amanah yang diberikan presiden dan rakyat. Terkait skripsi ini kepentingan penulis adalah untuk melengkapi sumber-sumber penelitian yang sedang dilakukan penulis dalam hal Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satunya adalah kabinet kerja yang dibentuk oleh Susilo Bambang Yudhoyono tersebut yang nantinya akan menjalankan roda pemerintahan dan akan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Skripsi Sutikno, (2013) yang berjudul *“Kebijakan Politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Kasus KPK Vs POLRI dalam Perspektif Siyasa*

(*Studi Kasus Susno Duadji dan Bibit-Chandra*)". Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai kebijakan-kebijakan ataupun langkah yang dilakukan pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meredam dan menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi di tubuh internal penegak hukum di Indonesia, yaitu kasus permusuhan antara KPK dengan intitusi POLRI, yang perlu digaris bawahi bahwa dalam skripsi ini lebih memfokuskan pada aspek siasat dan intrik politik yang dilakukan elite politik pemerintahan indonesia untuk melakukan lobi-lobi yang akan saling memberikan keuntungan satu sama lainnya, tetapi juga ditinjau dari aspek hukum islam, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa skripsi merupakan skripsi yang dikarang oleh Mahasiswa Jurusan Agama yang nantinya fokus kajian tidak akan pernah lepas dari Hukum Islam. Termasuk dalam kajian skripsi ini dalam hal pertikaian antara KPK dengan POLRI, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono adalah bersikap netral tanpa harus memihak kepada salah satu pihak yang sedang bersengketa ditubuh institusi penegak Hukum tersebut. Tetapi juga tidak lepas tangan dengan membiarkan kegaduhan terus berlanjut. Kepentingan penulis dalam skripsi ini adalah untuk melihat dan menambahkan sumber penelitian terkait Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam negeri indonesia, yang salah satunya dalam bidang politik adalah pertikaian yang terjadi antara dua tubuh instansi penegakan Hukum di Indonesia, yaitu KPK dengan POLRI.

Dari uraian di atas, dapat diambil penjelasan bahwa Kebijakan Politik dalam Negeri Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009 merupakan hasil musyawarah dan rapat kabinet pemerintahan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat indonesia, seperti dalam hal sosial budaya, politik, agama, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang menyangkut keberlangsungan kehidupan Indonesia secara umum. Sedangkan posisi penelitian ini adalah penelitian baru dalam hal studi Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan, yaitu Kebijakan Politik dalam Negeri Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Sosiologi Politik.

Pendekatan sosiologi politik ini mengkaji ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando di dalam sebuah lapisan masyarakat dan masyarakat nasional. Objek pendekatan sosiologi politik menganalisis kekuasaan di dalam masyarakat secara menyeluruh yang mencakup konflik antar individu-individu dan kelompok untuk memperoleh kekuasaan. Dasar sosiologi politik ialah menegakkan ketertiban sosial (Duverger, 1998:18-29). Pendekatan sosiologi politik ini dilandasi pemikiran bahwa seorang pemimpin bukan hanya untuk mencapai tujuan yang akan dicapai dalam suatu tujuan negara. Tanpa masyarakat, tujuan untuk memajukan negara tidak akan dapat tercapai. Pemakaian pendekatan sosiologi politik dapat membantu penulis mengetahui sejauh mana seseorang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh misalnya keputusan kebijakan, kewenangan politik, pengendalian sosial, dan perubahan sosial (Budiardjo, 2003:20). Sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, dan komando di dalam semua lapisan masyarakat, tidak hanya di dalam masyarakat nasional. Pengertian tersebut pada dasarnya membedakan antara pemerintah dengan yang diperintah. Di dalam suatu kelompok manusia terdapat orang yang memerintah dan orang yang mematuhi, terdapat mereka yang membuat keputusan dan orang-orang yang menaati keputusan tersebut. Ilmu sosiologi politik adalah gabungan anatara ilmu sosial dan politik yang berfokus pada hubungan antara masyarakat dan pemerintah, dimana pemerintah lebih berperan untuk mengatur masyarakat melalui lembaga ke pemerintahannya.

Pendekatan sosiologi politik ditujukan kepada para pembuat keputusan yang memiliki kekuasaan yang langsung menentukan perkembangan politik serta jalannya pemerintahan dalam suatu masyarakat. Pendekatan sosiologi politik dalam penelitian ini digunakan untuk dapat melihat perkembangan jalannya kebijakan yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut peneliti pendekatan sosiologi politik sangat cocok dalam pengambilan Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009.

Selanjutnya untuk mempertajam hasil analisis dengan pendekatan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menggunakan teori pembuat kebijakan

Laswell (dalam Syafie, 1992:35) mengemukakan sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu. Pembuatan kebijakan dalam analisa politik lebih mengarah pada proses pembuatan keputusan. Menurutnya suatu keputusan merupakan hasil dari suatu pertentangan yang membentuk kekuasaan atau merupakan hasil dari interaksi dalam arena politik. Teori ini digunakan dalam menganalisis kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah khususnya pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dimana pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan berbagai kebijakan politik.

Ada 2 akibat yang timbul dari penetapan kebijakan, yaitu: kebijakan yang *Berorientasi Pada Pelayanan Public* dalam arti sesuai dengan makna demokrasi dan kebijakan yang *Meracuni Public/* kebijakan yang ditetapkan hanya untuk kepentingan beberapa kalangan saja, dan hal dampak yang kedua ini sangatlah kontraproduktif terhadap nilai-nilai demokrasi. Seperti yang telah kita ketahui, salah satu fungsi politik untuk membuat kebijakan dan kebijakan ada karena 2 faktor yaitu; adanya masalah sosial dan adanya pergantian kekuasaan yang mengakibatkan kebijakan pun berubah-ubah. Kebijakan dapat diwujudkan dengan cara; *Pembuatan Peraturan UU, Perencanaan Kegiatan, Aneka Intervensi Terhadap Ekonomi/Social Masyarakat*. Karena kebijakan itu merupakan tindakan dan keputusan pemerintah maka kebijakan tersebut dicirikan dengan kekuasaan yang didominasi oleh pemerintah serta sesuai hukum dan wewenang pemerintah. Teori kekuasaan ini digunakan dalam menganalisis mengenai apa saja kebijakan penguasa yang terjadi di Indonesia ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden sehingga bisa membuat perubahan dalam tatanan masyarakat Indonesia tahun 2004–2009.

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijaksanaan-kebijaksanaan negara bersumber pada kenyataan bahwa kebijaksanaan itu dirumuskan oleh apa yang oleh Easton disebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik. Sehingga mereka bertanggung jawab atas urusan-urusan politik tersebut dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu sepanjang tindakan-tindakan tersebut masih berada dalam batasan peran dan kewenangan mereka.

Sehingga penjelasan tersebut membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijaksanaan negara, (Wahab, 2004: 5-7) yaitu:

- 1) Kebijaksanaan negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan negara dalam sistem politik modern pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang serba kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan;
- 2) Kebijaksanaan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri;
- 3) Kebijaksanaan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu;
- 4) Kebijaksanaan negara mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijaksanaan negara mungkin mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah-masalah tertentu, sementara dalam bentuknya yang negatif, ia kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan sejarah masa lampau. Metode penelitian sejarah adalah prosedur dari sejarawan untuk menuliskan kisah masa lampau berdasarkan jejak – jejak itu termuat dalam sumber sejarah (Notosusanto, 1985:17). Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian sejarah adalah cara yang digunakan seorang peneliti untuk mendapatkan jawaban berupa kesimpulan dari suatu persoalan dengan menggunakan metode – metode sejarah yang ada. Metode sejarah yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi (1) Heuristik, (2) Kritik, (3) Interpretasi, (4) Historiografi. Berikut akan penulis jelaskan ke-4 langkah metode penelitian sejarah dalam skripsi ini :

#### **1. Heuristik**

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti mencari sumber–sumber sampai mendapatkan data. Sumber yang berhasil dikumpulkan berupa sumber tertulis baik berupa artikel, buku, dokumen, dan penelitian terdahulu. Sumber data yang berhasil dikumpulkan kemudian dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber-sumber data yang dijadikan sumber primer yang dimaksud berupa penelitian-penelitian sebelumnya yang berupa buku-buku tentang Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan sumber sekunder adalah Skripsi, koran-koran, majalah dan dokumen lainnya yang menunjang tentang pembahasan skripsi yang dilakukan peneliti. Sebelum melakukan penelitian, pertama-tama peneliti melakukan penelitian di Perpustakaan dengan mencari skripsi yang berhubungan dengan pembahasan dan mencari informasi di internet yang kemudian dilanjutkan dengan membaca buku–buku pokok tentang Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Peneliti menggunakan sumber pendukung tentang penelitian ini yang dibuat pada tahun tersebut. Sumber itu diantaranya karya Nugroho (2010) buku yang berjudul

“*Tetralogi Sisi Lain Susilo Bambang Yudhoyono; Pak Beye dan Keluarganya, Pak Beye dan Istanyanya, Pak Beye dan Kerabatnya, Pak Beye dan Politiknya*”, karya Makruf (2016) buku yang berjudul “*Ensiklopedi Presiden Republik Indonesia; Susilo Bambang Yudhoyono*”, karya Lesmana (2009) buku yang berjudul “*Dari Soekarno sampai Susilo Bambang Yudhoyono; Intrik & Lobi Politik Para Penguasa*”, dan karya Hisyam (2004) yang berjudul “*Susilo Bambang Yudhoyono, Sang Demokrat*”, serta Karya-Karya Pribadi dari Susilo Bambang Yudhoyono diantaranya adalah “*Susilo Bambang Yudhoyono, Selalu ada Pilihan*” (2014).

Sumber sekunder merupakan sumber tertulis yang mendukung dan masuk ke dalam pembahasan skripsi ini yang relevan. Sumber sekunder biasanya ditulis oleh penulis profesional meskipun tidak terlibat langsung dalam kejadian tersebut. Sumber sekunder yang peneliti dapatkan berupa Surat Kabar dan Majalah diantaranya “*Berharap di Tengah Segudang Masalah*” dalam Tempo, 35/XXXIII, 25 Oktober 2004, “*Iklan Damai Pemantik Curiga*” dalam Tempo, 02/XXXIII, 08 Maret 2004. “*Kerumunan di Balik Susilo Bambang Yudhoyono*” dalam Kompas, 16 Juni 2009. “*Nyanyian Biografi Para Kandidat*” dalam Tempo, 15/XXXIII, 07 Juni 2004. “*Susilo Bambang Yudhoyono dan JK Berebut Perdamaian Aceh*” dalam Kompas, 20 Mei 2009. “*Susilo Bambang Yudhoyono; Megawati Tersenyum, Sebuah Duri telah Tercabut*” dalam Tempo, 03/XXXIII, 15 Maret 2004. Serta “*Utang Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla Terbesar*” dalam Kompas, 12 Juni 2009. Sumber – sumber tersebut di dapat dari perpustakaan daerah Jember serta pencarian secara langsung maupun online.

## 2. Kritik

Langkah selanjutnya dalam penelian sejarah ini kritik. Setelah mengumpulkan sumber-sumber sejarah, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah oleh peneliti adalah mengadakan kritik sumber, baik sumber primer maupun sekunder dilakukan kritik. (Sjamsudin, 1996:104). Kritik juga digunakan penulis dalam pengujian sumber-sumber sejarah agar menjadi sumber yang kredibel keasliannya. Pada langkah kritik ini ada dua macam yaitu kritik ekstern



dan kritik intern. Kritik ekstern ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk menilai apakah sumber yang digunakan dalam penelitian ini asli atau tidak. Langkah yang dilakukan adalah dengan melihat sampul, tahun terbit, pengarang, judul, serta latar belakang.

Setelah kritik ekstern selanjutnya yaitu kritik intern. Kritik intern yang dilakukan peneliti adalah melakukan penilaian secara kritis sumber – sumber yang telah didapat dengan cara membandingkan persamaan ataupun perbedaan beberapa penafsiran dari buku-buku yang diperoleh dari setiap data. Dengan adanya kritik intern ini penulis bisa mengetahui apakah sumber yang digunakan tersebut sudah bisa menjadi fakta sejarah. Seperti halnya dalam buku penunjang yang ditulis orang lain terkait dengan Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono yang berjudul *Susilo Bambang Yudhoyono Sang Demokrat* yang ditulis oleh Usamah Hisyam. Melalui kritik ekstern, penulis menentukan kredibilitas dan reabilitas buku ini apakah sesuai dan tidak menyimpang dengan pembahasan peneliti. Setelah mengkaji sumber yang ada penulis dapat menemukan data-data yang sesuai dan dibutuhkan dalam penelitian mengenai Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004-2009.

### **3. Interpretasi**

Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah interpretasi, data atau sumber sejarah yang dikritik akan menghasilkan fakta yang akan digunakan dalam penulisan sejarah. Interpretasi yang dilakukan oleh peneliti adalah proses menghubungkan – hubungkan atau mengkait-kaitkan fakta sejarah yang telah diwujudkan satu sama lainnya sehingga menjadi rangkaian yang masuk akal dalam arti menunjukkan keserasian antara satu dengan lainnya (Hariyono, 1995:110). Fakta – fakta sejarah harus diinterpretasi atau ditafsirkan agar suatu peristiwa dapat direkonstruksikan dengan baik, yaitu dengan cara menyeleksi, menyusun data, mengurangi tekanan, dan menempatkan fakta.

Kegiatan interpretasi merupakan proses penafsiran terhadap fakta – fakta yang ada untuk menetapkan makna yang saling berhubungan antara fakta satu

dengan yang lainnya yang telah terhimpun dan berhubungan dengan Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009. Setelah itu dirangkai dan disusun dengan kronologis menjadi suatu peristiwa, sehingga dapat diperoleh suatu kisah sejarah atau cerita sejarah yang benar sesuai realita peristiwanya. Kegiatan interpretasi ini terbagi menjadi dua macam yaitu analisis dan sintesis. Analisa yaitu menguraikan data-data yang telah diperoleh selama ini terkait Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sedangkan sintesis yaitu menghubungkan atau menyatukan data-data yang telah diperoleh sehingga ditemukan fakta sejarah (Kuntowijoyo, 2013:78).

Penulis dalam hal ini melakukan interpretasi terhadap fakta-fakta yang telah terkumpul untuk dirangkai dan dihubungkan menjadi bentuk yang logis, rasional, dan objektif. Fakta itu kemudian disusun secara kronologis sehingga didapat suatu fakta yang realistis mengenai Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004-2009.

#### **4. Historiografi**

Langkah terakhir peneliti melakukan historiografi/penyajian hasil interpretasi fakta dalam bentuk tulisan. Gottschalk (1986:32) historiografi merupakan kegiatan akhir dari langkah penelitian sejarah yang merupakan kegiatan merekonstruksi secara imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh. Dapat dikatakan bahwa metode historiografi merupakan metode puncak dari rangkaian kerja seorang peneliti, dari tahap inilah dapat diketahui baik buruk hasil kerja secara keseluruhan.

Dalam hal ini, peneliti harus memiliki kemampuan menampilkan kejelasan serta kerapian ekspresi penulisan sehingga fakta sejarah dapat dirangkai secara kronologis dan sistematis sehingga menjadi kisah sejarah yang bermakna. Historiografi yang dilakukan oleh peneliti menuliskan cerita sejarah tentang Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009 dengan cara merangkai fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh menjadi suatu kisah sejarah ilmiah yang jelas, rasional, logis, dan

objektif. Kemudian menyusun sejarah tersebut secara kronologis dan sistematis serta dapat diyakini kebenarannya.

Susunan hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan sistematika penulisan yang terdiri dari enam bab. Bab 1 adalah pendahuluan yang menyangkut latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada Bab 2 berisi tentang tinjauan pustaka yang berisi pendapat dan buku-buku serta sumber-sumber sejarah lainnya mengenai Kebijakan Politik dalam Negeri Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta teori yang cocok terhadap penelitian dan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bab 3 berisi tentang metode penelitian yang digunakan untuk menyusun karya ilmiah skripsi ini, yang terdiri dari empat tahap metode penelitian yakni Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Bab ini dipaparkan dan dijelaskan mengenai cara – cara yang digunakan peneliti dalam hal mengumpulkan sumber, data, dan merekonstruksi fakta sejarah yang nantinya akan menjadi satu kesatuan yang utuh, kronologis, sistematis, serta rasional.

Hasil penelitian dijelaskan pada bab 4, 5, dan 6. Bab 4 penulis memaparkan tentang Kebijakan Politik dalam Negeri Pemerintahan Negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam bab 4 ini peneliti lebih banyak memfokuskan pada permasalahan beberapa kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang diantaranya berupa Kebijakan Politik, Ketahanan dan Keamanan serta Kebijakan Ekonomi yang didalamnya membahas Tingkat Inflasi tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 serta jumlah pendudukan miskin dan tingkat kesejahteraan. Dalam bab 4 terakhir penulis memaparkan tentang kebijakan Sosial Budaya yang di dalamnya membahas mengenai beberapa kontroversi kehidupan sosial dan budaya Indonesia selama berada di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009.

Bab 5 penulis memaparkan tentang dampak yang diakibatkan dari kebijakan politik dalam negeri masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2005. Pada bab 5 ini lebih banyak difokuskan kepada dampak Bidang politik, Ekonomi serta dampak dalam bidang pendidikan. Bab 6

yaitu penutup, ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang memberikan kesimpulan dari penjelasan mengenai bab pembahasan. Di bagian bab ini juga terdapat saran yang diberikan oleh peneliti ke berbagai pihak yang membacanya.



## BAB 6. PENUTUP

### 6.1 Simpulan

Berdasarkan uraian di atas terkait dengan kebijakan politik dalam negeri pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat diambil beberapa kesimpulan sebagaimana berikut ini:

Kebijakan politik dalam negeri pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilakukan untuk menjunjung tinggi nilai nilai demokrasi dan menjaga stabilitas nasional, baik dalam hal keamanan dan kesejahteraan seluruh rakyat indonesia. Selama menjabat sebagai presiden yang terpilih secara demokratis, presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan beberapa kebijakan politik dalam negeri, diantaranya sebagai berikut; (1) *Politik*, dalam hal perpolitikan selama masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menganut sistem Trias Politika, yaitu pemisahan kekuasaan secara absolute antara Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif. Serta partai-partai bebas didirikan dengan syarat sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 sehingga berdampak pada kekuasaan yang mengharuskan melakukan koalisi partai di parlemen untuk menjaga stabilitas politik dari gemoni kekuasaan. (2) *Ketahanan dan Keamanan*, dalam hal ketahanan, presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerapkan beberapa kebijakan untuk menjaga ketahanan, baik ketahanan pangan dll, salah satunya dengan mengeluarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk rakyat miskin. Tetapi selama masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengalami beberapa kegagalan dalam hal keamanan untuk menjaga kekondusifan keadaan Negara, salah satunya adalah kegagalan dalam menekan angka Korupsi, serta kegagalan dalam menciptakan stabilitas nasional dari terorisme. Salah satunya adalah teror Bom dan lemahnya penegakan Hukum dan peradilan di Indonesia pada waktu itu. (3) *Ekonomi*, dalam hal ekonomi. Pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai berhasil selama di awal kepemimpinannya sebagai presiden untuk periode pertama. Keberhasilan tersebut dengan menekan laju inflasi perekonomian negara, serta menekan jumlah pengangguran dan angka kemiskinan. Tetapi angka inflasi, pengangguran dan penduduk miskin mengalami

peningkatan ketika akhir masa jabatan. (4) *Sosial Budaya*, dalam hal kebijakan sosial budaya presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menjaga hak-hak perempuan dengan mengeluarkan UUD Pornografi dan Pornoaksi untuk melindungi anak-anak, remaja dan hak perempuan. Di sisi lain dalam hal budaya juga berhasil menjadikan Batik sebagai kebudayaan asli Indonesia setelah disahkan oleh pihak UNESCO. Tetapi di sisi lain dalam hal budaya Indonesia dibawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dianggap lemah untuk menjaga dan melestarikan aset bangsa setelah beberapa kebudayaan dan hasil budaya Indonesia diklaim oleh pihak luar.

## 6.2 Saran

Ada beberapa saran yang akan penulis berikan kepada para pembaca, di antaranya :

- 1) Kepada para Mahasiswa calon guru sejarah, Penelitian ini diharapkan dapat mengasah dan memahami secara mendalam mengenai kebijakan politik dalam negeri pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009.
- 2) Kepada almamater, hendaknya memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengadakan penelitian, terutama yang berada di wilayah sendiri, sehingga akan membawa dampak terhadap rasa cinta tanah air, bangsa dan negara.
- 3) Bagi pembaca, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan politik dalam negeri pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009, dan dapat mengambil nilai-nilai tauladan yang dicontohkan dari sosok Susilo Bambang Yudhoyono, baik dalam hal perjalanan politik, hambatan, perjuangan, dan kepemimpinannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Budiardjo, M. 2003. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Duverger. 1998. *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Gottschalk, L. 1985. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Hariyono, 1995. *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hisyam, U. 2004. *Susilo Bambang Yudhoyono; Sang Demokrat*. Jakarta: Dharmapena
- Kuntowijoyo, 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Kompas, 2009. “*Utang Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla Terbesar*” dalam Kompas, 12 Juni 2009.
- Kompas, 2009. “*Kerumunan di Balik Susilo Bambang Yudhoyono*” dalam Kompas, 16 Juni 2009.
- Kompas, 2009. “*Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla Berebut Perdamaian Aceh*” dalam Kompas, 20 Mei 2009.
- Lesmana, T. 2009. *Dari Soekarno Sampai Susilo Bambang Yudhoyono; Intrik & Lobi Politik Para Penguasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Makruf, 2016. *Ensiklopedi Presiden Republik Indonesia; Susilo Bambang Yudhyono*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurhandayani, D. 2013. *Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Dalam Penyelesaian Kekerasan Etnis Muslim Rohingya di Myanmar*. Tidak Diterbitkan. *Skripsi*. Jakarta. Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nugroho, W. 2010. *Tetralogi Sisi Lain Susilo Bambang Yudhoyono; Pak Beye dan Keluarganya*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Nugroho, W. 2010. *Tetralogi Sisi Lain Susilo Bambang Yudhoyono; Pak Beye dan Kerabatnya*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Nugroho, W. 2010. *Tetralogi Sisi Lain Susilo Bambang Yudhoyono; Pak Beye dan Istananya*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Nugroho, W. 2010. *Tetralogi Sisi Lain Susilo Bambang Yudhoyono; Pak Beye dan Politiknya*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

- Noer, D. 2007. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Risalah Rajawali
- Sari, N. 2016. *Reformasi Birokrasi di Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2009-2014*. Tidak Diterbitkan. *Skripsi*. Lampung. Universitas Lampung.
- Sutikno, 2013. *Kebijakan Politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Kasus KPK Vs POLRI dalam Perspektif Siyasah (Studi Kasus Susno Duadji dan Bibit-Chandra)*. Tidak Diterbitkan. *Skripsi*. Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Strong, C. F. 1998. *Ekologi Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Mizan
- Sjamsuddin, H. 1996. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Proyek Pendidikan Tenaga Akademik.
- Syafi'ie. 1992. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Tempo, 2004. "Berharap di Tengah Segudang Masalah" dalam Tempo, 35/XXXIII, 25 Oktober 2004,
- Tempo, 2004. "Iklan Damai Pemantik Curiga" dalam Tempo, 02/XXXIII, 08 Maret 2004.
- Tempo, 2004. "Nyanyian Biografi Para Kandidat" dalam Tempo, 15/XXXIII, 07 Juni 2004.
- Tempo. 2004. "Susilo Bambang Yudhoyono; Megawati Tersenyum, Sebuah Duri telah Tercabut" dalam Tempo, 03/XXXIII, 15 Maret 2004.
- The Indonesian Institue, 2005. *Evaluasi Pemerintahan SBY-Kalla*. Aly Yusuf, M. E. (Peneliti Bidang Politik). Jakarta.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Universitas Pres
- Wahab, 2004. *Kebijakan Negara dalam Pemerintahan*. Bandung: Media Pustaka
- Yudhoyono, S. B. 2014. *Susilo Bambang Yudhoyono; Selalu Ada Pilihan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.



## LAMPIRAN A

## Matriks Penelitian

Topik	Judul	Permasalahan	Jenis dan Sifat penelitian	Sumber Data	Metode Penelitian
Sejarah Politik Indonesia	Kebijakan Politik dalam Negeri Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004-2009	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) bagaimanakah Kebijakan Politik dalam negeri Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009 ?</li> <li>2) Bagaimanakah dampak Kebijakan Politik dalam dan luar negeri Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jenis Penelitian : Penelitian Sejarah</li> <li>2) Sifat Penelitian : Studi Pustaka dan Literatur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Buku</li> <li>2) Skripsi</li> <li>3) Internet</li> <li>4) Majalah</li> <li>5) Koran</li> <li>6) Arsip</li> <li>7) Dokumen</li> </ol>	<p>Metode Penelitian Sejarah. Dengan langkah-langkah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Heuristik</li> <li>2) Kritik</li> <li>3) Interpretasi</li> <li>4) Historiografi</li> </ol>

**LAMPIRAN B. Profil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono****Susilo Bambang Yudhoyono**

**Presiden Indonesia ke-6**

**Masa jabatan**

20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2014

**Wakil Presiden** [Jusuf Kalla](#) (2004–2009)  
[Boediono](#) (2009–2014)

**Didahului oleh** [Megawati Soekarnoputri](#)

**Digantikan oleh** [Joko Widodo](#)

**Ketua Umum Partai Demokrat ke-4**

**Petahana**

**Mulai menjabat**

30 Maret 2013

Didahului oleh [Anas Urbaningrum](#)

**Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan  
Republik Indonesia ke-8**

**Masa jabatan**

9 Agustus 2001 – 12 Maret 2004

Presiden [Megawati Soekarnoputri](#)

Didahului oleh [Agum Gumelar](#)

Digantikan oleh [Hari Sabarno](#) (ad-interim)

**Masa jabatan**

23 Agustus 2000 – 1 Juni 2001

Presiden [Abdurrahman Wahid](#)

Didahului oleh [Soerjadi Soedirdja](#)

Digantikan oleh [Agum Gumelar](#)

**Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia ke-11**

**Masa jabatan**

26 Oktober 1999 – 23 Agustus 2000

Presiden [Abdurrahman Wahid](#)

Didahului oleh [Kuntoro Mangkusubroto](#)

Digantikan oleh [Purnomo Yusgiantoro](#)

**Panglima Komando Daerah Militer II/Sriwijayake-24****Masa jabatan**

23 Agustus 1996 – 7 Agustus 1997

**Presiden** [Soeharto](#)**Didahului oleh** Mayjen TNI R. Karyono**Digantikan oleh** Mayjen TNI Suadi Atma**Informasi pribadi****Lahir** [9 September 1949](#) (umur 68)  
 [Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia](#)**Kebangsaan** [Indonesia](#)**Partai politik**  [Partai Demokrat](#)**Suami/istri** [Kristiani Herrawati](#)**Anak** [Agus Harimurti Yudhoyono](#)  
[Edhie Baskoro Yudhoyono](#)**Orangtua** Soekotjo  
Siti Habibah**Alma mater** [Akademi Militer](#) (1973)  
US Army Command & General Staff College  
Webster University  
[Institut Pertanian Bogor](#)**Profesi** [TNI](#)

	<u>Politikus</u>
<b>Agama</b>	<u>Islam</u>
<b>Tanda tangan</b>	
<b>Media sosial</b>	
<b>Akun Twitter</b>	<u>Susilo Bambang Yudhoyono</u>
<b>Dinas militer</b>	
<b>Pengabdian</b>	 <u>Indonesia</u>
<b>Dinas/cabang</b>	 <u>TNI Angkatan Darat</u>
<b>Masa dinas</b>	1973–2000
<b>Pangkat</b>	 <u>Jenderal TNI</u>
<b>Unit</b>	<u>Infanteri (Kostrad)</u>
<b>Penghargaan</b>	<u>Adhi Makayasa (1973)</u>  <u>Bintang Republik Indonesia Adipurna</u>

Sumber : [https://id.wikipedia.org/wiki/Susilo Bambang Yudhoyono](https://id.wikipedia.org/wiki/Susilo_Bambang_Yudhoyono) diakses pada tanggal 22 January 2018